Yogyakarta, 25 Maret 1969

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 2
Tahun 1969

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 1968 (2/1968)
TENTANG

PERUBAHAN RODA GEROBAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa bagian-bagian jalan beraspal yang dilalui oleh gerobak-gerobak yang menggunakan roda-roda ban besi/baja, mengalami kerusakan-kerusakan lebih cepat, dibandingkan dengan jalan-jalan yang tidak dilaluinya;
2. Bahwa kerusakan jalan tersebut membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk perbaikannya, hingga dipandang perlu adanya usaha pencegahan untuk mengurangi kerusakan-kerusakan jalan tersebut agar keuangan Negara dapat dihemat;
3. Bahwa kerusakan-kerusakan tersebut merupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran lalu lintas ekonomi;
4. Bahwa perubahan roda gerobak, disamping dapat mengurangi kerusakan pada jalan-jalan yang dilaluinya, menyebabkan konstruksi yang lebih ringan sehingga dapat menambah panjang umur hewan penariknya, sedangkan stabilisasi jalannya lebih terjamin, karena tingginya dari atas tanah berkurang.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 pasal 12;
4. Wegverkeersverordening (W.V.V) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 1964;

5. Wegverkeersbesluit Directeur Verkeer & Waterstaat (W.V.B. - V.&W.) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 22 April 1968 No. U. 5/I/22/Phb;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1961;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat pleno pada tanggal 16 Juli dan 7 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "Perubahan Roda Gerobak di Daerah Istimewa Yogyakarta" sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. gerobak ialah kendaraan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b Wegverkeers-verordening (W.V.V);
- b. perubahan roda gerobak yang dimaksud ialah perubahan penggunaan ban besi/baja pada roda-roda gerobak dengan ban angin (ban hidup) beserta perlengkapan pengamanannya;
- c. jalan aspal ialah semua jalan yang bagian teratasnya terdiri dari lapisan aspal;
- d. jalan Negara/Propinsi ialah semua jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Negara (Pemerintah Pusat)/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. jalan Kabupaten ialah semua jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
- f. jalan desa ialah semua jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kabupaten/desa yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Sesudah satu tahun sejak diundangkan peraturan ini, semua gerobak dilarang berjalan di atas aspal, yang termasuk jalan Negara/Propinsi, jika tidak menggunakan roda-roda yang dilengkapi dengan:

- a. ban angin (ban hidup), jika muatan sumbunya lebih dari lima ratus kg;
 - b. ban karet (ban mati), jika muatan sumbunya lima ratus kg atau kurang.
- (2) Syarat-syarat untuk ban angin (ban hidup) tersebut dimuka adalah sebagaimana tercantum dalam uraian tersebut dalam pasal 10 ayat (1) Werverkeersbluit Directeur Verkeer & Waterstaat (W.V.B.V & W).
 - (3) Pemasangan ban mati dari karet tersebut dimuka harus sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 30 ayat (2) Wegverkeers-Verordening (W.V.V).

Pasal 3

Dengan keputusan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kelurahan dapat dikeluarkan ketentuan-ketentuan tentang keharusan perubahan roda gerobak-gerobak yang berjalan di jalan aspal yang termasuk jalan Kabupaten atau jalan desa tanpa mengurangi jiwa dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan).

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 7 Agustus 1968
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ttd.

Wakil Ketua,
Gerson Harsono

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

(PAKU ALAM VIII)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Januari Nomor Pemda
10/3/11.10

A.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonom Daerah

Ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
Mayor Jenderal T.N.I.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A
Nomor 2 tanggal 25 Maret 1969
Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

MOELJONO MOELIADI, S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1968
TENTANG
PERUBAHAN RODA GEROBAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sudah menjadi kenyataan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari para pemilik/pengemudi gerobak, terutama gerobak sapi, selalu berusaha untuk memuati kendaraannya sebanyak mungkin, sehingga untuk menariknya bila perlu digunakan sapi dua tiga ekor.

Akibat muatan semacam itu ialah jalannya kendaraan tersebut tidak dapat tenang lurus sebagaimana mestinya, tetapi dengan putaran roda-roda yang miring-miring kekiri dan kekanan. Dengan cara berjalan yang demikian maka roda gerobak tersebut yang diperlengkapi dengan ban mati dan besi/baja, dalam waktu yang relatif pendek, dengan mudah dapat merusak lapisan-lapisan aspal perkerasan jalan yang dilaluinya.

Menghadapi pelanggaran-pelanggaran tersebut dimuka, dipandang dari segi sosial ekonomi, penuntutan terhadap kelebihan-kelebihan muatan oleh gerobak (diproses verbal), pada dewasa ini kurang dapat dibenarkan.

Dalam pada itu perbaikan jalan-jalan yang rusak tersebut memerlukan pembiayaan yang tinggi, yang sangat memberatkan beban Negara, lebih-lebih kalau diingat bahwasanya aspal tersebut sebagian besar harus didatangkan dari Luar Negeri (Import).

Salah satu jalan untuk menjaga jalan-jalan aspal dari kerusakan-kerusakan yang parah ialah dengan mengharuskan gerobak-gerobak yang berjalan di atasnya menggunakan perlengkapan roda-roda dengan ban-ban hidup, ban truck/mobil, paling sedikit dengan ban-ban mati dari karet yang cukup tebal yaitu untuk gerobak-gerobak kecil/ringan. Alangkah baiknya, apabila ketentuan perubahan roda gerobak tersebut berlaku untuk semua jalan-jalan yang telah diperkeras, akan tetapi untuk masa kini dan beberapa tahun lagi, cukuplah kiranya jika dibatasi pada jalan-jalan yang dilapisi aspal saja.

Secara praktis, hampir semua gerobak, dengan keluarnya Peraturan Daerah ini terpaksa harus diperlengkapi dengan roda-roda dengan ban hidup, mengingat kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya menuju ke pusat perdagangan.

Namun demikian masih tetap terbuka lapangan hidup bagi gerobak-gerobak yang karena keadaannya belum sempat dimodenisir, yaitu didaerah-daerah dengan jalan yang belum/tidak diperkeras/diaspal, seperti jalan-jalan dihutan-hutan kayu/perkebunan (angkutan hasil hutan, hasil perkebunan kayu dan sebagainya) didaerah persawahan, didaerah-daerah pegunungan dan sebagainya.

Perubahan ban besi dengan ban angin/ban karet dapat meringankan menariknya, sehingga dapat mengakibatkan ditambahkan muatan atau dapat dikurangi hewan penariknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 (1) : Masa satu tahun termaksud ialah untuk memberikan kesempatan kepada para pemilik gerobak untuk mengubah roda-rodanya ataupun memindahkan/mencari daerah kerja yang sesuai, bila tidak menghendaki perubahan roda tersebut. Pembatasan 500 kg tersebut adalah mengingat adanya cikal-cikar (untuk angkut barang) yang ringan, yang biasa dihela seekor kuda.

(2) : Untuk memperoleh izin muat yang maksimum menurut kekuatan ban hidup, diharuskan menggunakan ban-ban yang belum tampak lapisan kempasnya. Akan tetapi akan kecepatan jalan dari pada gerobak adalah lambat sekali, maka bahaya yang ditimbulkan oleh meletusnya ban secara tiba-tiba adalah kecil saja, sehingga penggunaan ban truck/mobil bekas (dengan kempas yang kelihatan sedikitpun) dapatlah dipertanggungjawabkan.

(3) : Pemasangan ban mati dari karet harus kuat dan

melekat benar-benar pada seluruh permukaan lebar roda dan tebalnya dapatlah ditentukan paling sedikit 3 (tiga) cm.

- Pasal 3 : Sesuai dengan kewenangannya, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku untuk jalan-jalan Negara dan jalan Propinsi saja, sedangkan untuk jalan-jalan Kabupaten dan jalan-jalan desa, dengan bersendikan Peraturan Daerah ini, dapat diatur dengan Keputusan Pemerintah Daerah yang bersangkutan c.q. Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Keputusan Lurah Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan tambahan ini antara lain ialah:
- a. Petunjuk-petunjuk teknis dari pada bentuk dan perlengkapan gerobak;
 - b. Kemungkinan pemberian bantuan kredit guna memungkinkan para pemilik gerobak melaksanakan ketentuan itu. Pemberian wewenang kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi untuk memasang rambu-rambu larangan yang diperlukan, untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 6 : Berlakunya praktis adalah seperti yang tercantum dalam ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1).